

PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2003-2014

Ahmad Yogga Setiawan, Drs. Bambang Samsu Badriyanto M.Si
Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan X. No. 139 Jember
E-mail : ahmadyogga@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melonjaknya PAD Kabupaten Jember sejak program Bulan Berkunjung ke Jember yang menggandeng Jember Fashion Carnaval dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan alasan pemerintah Kabupaten Jember mengembangkan pariwisata sebagai industri, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata, dan melacak dampak apa saja dengan adanya pariwisata bagi perekonomian pemerintah kabupaten maupun masyarakat Jember. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dijadikan kajian. Sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Melalui program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) pemerintah Kabupaten Jember mempromosi potensi-potensi wisata yang dimiliki. BBJ merupakan rangkaian kegiatan wisata olah raga, kuliner, dan budaya yang pertamakali dilaksanakan pada 2007 dengan maksud menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Perkembangan pariwisata Kabupaten Jember semakin dikenal luas dengan adanya kreativitas seniman lokal dalam mengemas pameran busana model karnaval sepanjang 3,6 km. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jember. Dampak perkembangan pariwisata adalah peningkatan PAD Kabupaten Jember. Tahun 2008, PAD Kabupaten Jember dari sektor pariwisata hanya menyumbangkan Rp 2,5 Miliar, namun pada tahun 2014 sumbangan dari sektor pariwisata mampu menembus angka Rp 12 Miliar, dan dari jumlah total ini Rp 1,2 Miliar dihasilkan dari restoran atau wisata kuliner.

Kata Kunci : Program Bulan Berkunjung Ke Jember, Jember Fashion Carnaval, Perkembangan Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This research is motivated by soaring PAD Jember since the program Month Visit To Jember Jember Fashion Carnaval took place. The purpose of this study was reveal reason Jember regency government to develop tourism as an industry, what is being done Jember regency government in developing tourism, and keep track of what impact the presence of tourism to the economy and society Jember district government. This study uses history to reveal the problems that made the study. The tourism sector contributed greatly to the Local Revenue. Through the Month Visit To Jember (BBJ) government Jember promote tourism potentials possessed. BBJ is a series of sports tourism, culinary, and culture was first implemented in 2007 with the intent welcomes Indonesia's independence day. The development of tourism Jember more widely known by the creativity of local artists in a packed fashion show models of carnival along the 3.6 Km. Hal this is the reason the government to develop tourism in Jember. The impact of tourism development is the increase in revenue Jember. In 2008, revenue from the tourism sector Jember only donate Rp 2.5 billion, but in 2014 the contribution of the tourism sector is able to break the USD 12 billion, and of this total amount of USD 1.2 billion resulting from the restaurant or culinary.

Keywords: Program Month Visit to Jember Month , Jember Fashion Carnaval, Tourism Development, Local Revenue,

Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015

Pendahuluan

Industri pariwisata di Indonesia pada umumnya baru berkembang pada masa Orde Baru. Hal ini disebabkan pada masa Orde Lama kondisi sosial politik dalam negeri Indonesia masih belum memungkinkan untuk mengembangkan industri pariwisata, karena pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia masih harus menghadapi berbagai gejolak sosial politik, seperti silih bergantinya pemerintahan yang berakibat pada ketidakstabilan politik pemerintah, Agresi Militer Belanda I dan II, peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948, dan peristiwa pembantaian PKI tahun 1965 (Kahin, 1995; 171).

Memasuki masa Orde Baru, pemerintah mulai menstabilkan kondisi sosial politik, dengan mencanangkan program pembangunan, mulai dari pembangunan struktur seperti sistem pemerintahan, sistem kepartaian, sampai pembangunan infrastruktur jalan, gedung-gedung perkantoran, pertanian, dan perikanan. Berbagai pembangunan secara tidak langsung menumbuhkan gairah perekonomian di Indonesia, sehingga perkembangan industri tumbuh dengan cepat (Linblad, 2002; 37). Salah satu dampak stabilitas politik pemerintah Orde Baru adalah tumbuhnya pariwisata yang ditandai dengan berdirinya industri-industri pariwisata yang berdiri di sekitar tempat-tempat wisata.

Berdasarkan pertimbangan keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, pemerintah memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, guna mendorong pembangunan daerah. pemerintah akhirnya mengeluarkan undang-undang kepariwisataan yang dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1990 (Kodyat, 1996;90).

Namun hal ini tidak menjadikan industri pariwisata di daerah-daerah kabupaten berkembang dengan pesat. Sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, di mana pemerintah pusat memegang penuh semua kendali pemerintahan daerah dan posisi pemerintah daerah dalam sistem ini hanya sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri. Akibatnya pemerintah daerah kurang produktif dalam mengelola kekayaan alam masing-masing dan kegiatan pariwisata kurang dikelola secara maksimal (Antlov, 2001; 54).

Pergantian sistem pemerintahan dengan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alamnya awal dari perkembangan pariwisata di daerah. Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah yang

berada di ujung timur Pulau Jawa. Secara geografis wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan sehingga pada peta nampak seperti mangkuk (Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember, 2014).

Keadaan alam yang banyak menyajikan pemandangan alam pegunungan, pantai, dan perkebunan menjadikan Kabupaten Jember berpotensi besar menjadi salah satu tempat untuk tujuan wisata. Pariwisata Jember dilihat dari jenis objek wisatanya menyajikan objek wisata budaya dan objek wisata alam. Objek wisata budaya antara lain, Petik Laut, Festival Pegon Hias, Kesenian Reog, Musik Patrol dan Hadrah, serta Jember Fashion Carnaval; sedangkan objek wisata alam antara lain, wisata perkebunan, wisata agro di Rembangan, pesona pantai Paseban, Getem, Puger, Papuma, Watu Ulo, Payangan, Rowo Cangak, Nanggalan dan Bandalit. Potensi wisata yang begitu besar yang dimiliki daerah ini, menjadikan pemerintah Kabupaten Jember berinisiatif untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang bisa dijadikan landasan hukum bagi pengembangan kepariwisataan.

Fokus kajian ini dilaksanakan di Kabupaten Jember. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan alasan pemerintah Kabupaten Jember mengembangkan pariwisata sebagai industri, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dalam mengembangkan pariwisata, dan melacak dampak apa saja dengan adanya pariwisata bagi perekonomian pemerintah kabupaten maupun masyarakat Jember. Guna mempermudah penganalisaan masalah, penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Pembangunan untuk mempelajari, menganalisis, menjabarkan dan menjawab hal-hal yang ada kaitannya dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai bentuk dan akibat dari pembangunan dalam suatu masyarakat (Schoorl, 1980; 56). Adapun metode sejarah digunakan oleh penulis, karena dengan melalui tahap-tahap penelitian di dalamnya dapat diperoleh historiografi yang kronologis. Tahap-tahap yang harus dilalui yakni pengumpulan sumber sejarah (heuristik) kritik sumber sejarah, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).

Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Jember

Sejak terjadi perubahan sistem politik akibat reformasi yang digulirkan pada 1998 dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kekayaan alamnya masing-masing. Kebijakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengurus wilayahnya masing-masing ini dikenal dengan Otonomi Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No.21 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan terbitnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (Pheni Chalid, 2005; 23). Pelaksanaan Otonomi Daerah secara tidak langsung membawa

perubahan dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Tujuan pemberian wewenang dalam mengatur dan mengelola pemerintah daerah adalah agar aparat birokrasi pemerintahan dapat menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, mengoptimalkan seluruh sumber daya atau kekayaan daerah secara lebih berdaya guna dalam memberikan nilai tambah bagi pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi target utama pemerintah daerah. Implementasi dari pengelolaan kekayaan alam adalah dengan membuat strategi dan inovasi pemasaran serta menawarkan potensi daerahnya sebagai upaya menarik pengunjung sebanyak-banyaknya yang nantinya dapat meningkatkan jumlah investor untuk menanamkan modalnya di daerah, sehingga berdampak pada peningkatan PAD yang bersangkutan (Wiwiho, 1999; 34).

Pengelolaan kekayaan dan aset daerah yang menjadi sumber daya ekonomi daerah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena sumber keuangan pemerintah daerah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan dan aset daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan dan aset daerah perlu ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya (Arsyad, 1990; 23)

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam kepariwisataan, Jember belum mampu mengelola sendiri kekayaan alam yang berupa pariwisata. Persoalan ini bermuara pada ketiadaan kebijakan pemerintah daerah yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, guna memfasilitasi dan memaksimalkan pengelolaan pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Jember menerbitkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, beberapa Perda diterbitkan untuk dijadikan landasan dasar dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata Kabupaten Jember, yaitu Perda No. 8 Tahun 2003 yang berkaitan dengan Usaha Kepariwisataan, Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Redistribusi Ijin Usaha Kepariwisataan dan Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Redistribusi Masuk Objek Wisata. Bersamaan dengan itu pemerintah Kabupaten Jember juga mengeluarkan Perda No 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Perda No. 30 kemudian diperjelas lagi dalam Perda No. 20 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember (Tim Penyusun, 2007; 34). Guna mewujudkan keseriusan pemerintah dalam mengelola pariwisata, pemerintah Kabupaten Jember mendirikan instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola dan

mengembangkan pariwisata, yaitu Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember di Jl. Jawa No. 74. Pendirian badan resmi pemerintah ini diikuti dengan pembentukan formatur organisasi (Kantor Pariwisata dan Kebudayaan, 2005; 3).

Berdirinya Kantor Pariwisata dan Kebudayaan sebagai badan pemerintahan daerah yang resmi bertanggung jawab sebagai pengelola pariwisata tidak serta merta menjadikan pariwisata di Kabupaten Jember berkembang. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi sosial politik masa kepemimpinan Syamsul Hadi Siswoyo, yang kurang kondusif bagi pengembangan pariwisata akibat mengemukakan gejolak sosial, yaitu demonstrasi masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dipicu oleh permasalahan tanah. Demonstrasi masyarakat ini bermuara pada perebutan tanah bekas perkebunan swasta milik pengusaha Belanda antara rakyat pemilik lahan dengan perusahaan negara (Perhutani, PTPN, dan PDP) (Istiqomah, 1982; 22).

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember mulai terlihat sejak kepemimpinan Kabupaten Jember dipegang oleh MZA. Djalal yang menjabat selama dua periode yaitu pada 2005-2010 dan 2010-2015. Dengan mengusung konsep *Menata Kota Membangun Desa*, Djalal menggalakkan program pembangunan di wilayah Jember untuk membangun kepercayaan para investor. Langkah awal dalam pembangunan perekonomian daerah Jember dimulai dengan membuat rencana strategis pembangunan. Ada tiga sektor dalam rencana strategis pembangunan yang diprioritaskan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Jember, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor pariwisata (Bappeda, 2008; 6). Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu dari tiga sektor yang diprioritaskan karena daerah Jember mempunyai potensi kekayaan alam yang menarik bagi pengembangan pariwisata, dan di samping itu sektor pariwisata dapat menyerap sumberdaya alam dan sumber daya manusia secara bersama-sama (Pemerintah Kabupaten, 2010; 4)

Sasaran pertama dalam program pembangunan yang digalakkan MZA. Djalal adalah renovasi pembangunan alun-alun Kota Jember, melakukan pelebaran jalan-jalan utama di wilayah Kota Jember sehingga lalu lintas kendaraan berjalan dengan lancar serta pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang menuju ke tempat-tempat wisata di daerah-daerah pinggiran kota juga digalakkan. Hal yang paling urgen dalam perkembangan pariwisata adalah dibukanya bandara Notohadinagara untuk mempermudah perjalanan para wisatawan yang transit di Surabaya. Sarana transportasi udara merupakan modal transportasi yang efektif, efisien, cepat, selamat, dan nyaman. Salah satu fasilitas pelayanan dalam bidang penerbangan adalah bandara (*airport*) yang melayani arus lalu lintas penumpang udara dan pesawat udara

dari menuju ke bandara tersebut (*Majalah Jember Kita*, Oktober, 2013, 10th edn, hlm. 10-14).

Kreasi masyarakat lokal menjadi sangat berperan dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Jember. *Jember Fashion Carnaval* (JFC) merupakan sebuah karnaval yang diilhami oleh peragaan busana setiap minggu (*fashion week*) di rumah-rumah mode Eropa. Sejarah teretusnya ide JFC bermula pada tahun 1998. Suyanto kakak pertama Dynand Fariz mendapat pensiun dini, kemudian membeli sebuah bangunan di perumahan Gunung Batu Permai Jember. Pada saat itu, Suyanto berniat membuka usaha sendiri dan bersamaan dengan itu pulanglah Dynand Fariz dari sekolah mode di Paris. Melalui kolaborasi modal dari Suyanto dan keahlian dari Dynand Fariz, dibukalah sebuah rumah mode yang diberi nama *Dynand Fariz International High Fashion Center*. Dalam perjalanannya, *Dynand Fariz international High Fashion Center* berusaha memakai tradisi rumah mode di Eropa yang salah satunya mengadakan peragaan busana tiap minggunya dengan mewajibkan semua karyawan untuk memakai busana yang sedang trend di dunia saat itu. Setelah beberapa kali mengadakan peragaan busana, akhirnya para karyawan mengusulkan untuk tampil di alun-alun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan busana yang telah mereka rancang hanya dipakai di rumah mode Dynand Fariz atau hanya dipakai selama perjalanan dari rumah ke kantor. Para akhirnya karyawan mengusulkan untuk tampil di alun-alun kota Jember dan diputuskan tampil berparade di alun-alun kota Jember (Jannah, 2010; 84).

Melihat perubahan-perubahan positif yang diterima oleh JFC hingga saat ini, akhirnya JFC melihat perlu melakukan berbagai cara agar konsepsi Jember kota karnaval ini dapat diterima oleh masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jika dikatakan JFC memberi dampak ekonomi, mungkin belum sepenuhnya mengingat JFC hanya terjadi 1 hari dalam sebulan dan selanjutnya Kota Jember seperti hari-hari biasa, sepi dan jauh dari gambaran kota karnaval. Hal inilah yang akhirnya membuat manajemen JFC perlu membuat semacam *event-event* kecil yang dapat memberi semangat dan sentuhan agar Jember atau warga Jember nantinya terbiasa dengan seni dan pertunjukan. *Event-event* kecil yang kontinu dilakukan oleh JFC, warga Jember mulai tahu apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh JFC. Misalnya, saat ini semakin mudah mengatur penonton di alun-alun, apresiasi yang diberikan oleh warga Jember terhadap JFC juga semakin baik. Dari *events* ini juga disosialisasikan apa-apa saja yang telah JFC lakukan, tampilan JFC *roadshow* kemana aja, kemudian prestasi apa saja yang telah diraih oleh JFC, dan lain sebagainya. JFC menginformasikan kepada warga Jember segala hal termasuk rekrutmen kepada warga Jember untuk masuk menjadi peserta JFC (Jannah, 2010; 45).

Selain pembenahan infrastruktur pemda membuat program Bulan Berkunjung Ke Jember (BBJ). Program ini pertama kali dilaksanakan pada 2007 yang bertujuan untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Pada dasarnya program BBJ ini didorong oleh suksesnya acara JFC yang setiap tahun digelar pada bulan Januari untuk memperingati hari jadi Kota Jember dan mendapat respon serta dukungan positif dari masyarakat Jember. pemerintah melihat peluang dengan digelarnya acara JFC sebagai wadah untuk memperkenalkan daerah Jember dan mempromosikan potensi wisata Kabupaten Jember (Wangsa, 2010; 28). Tujuan dari BBJ ini adalah menggairahkan peran masyarakat dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat untuk meraih prestasi, baik prestasi di bidang olahraga, seni dan sains serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif yang tercipta selama BBJ berlangsung. Program BBJ diakui sebagai daya tarik luar biasa untuk menarik masuknya wisatawan ke Jember. Namun kehadiran para turis akan semakin bagus jika tidak hanya datang untuk BBJ. Pihak Kantor Pariwisata Jember saat ini tengah menyiapkan berbagai hal untuk merumuskan promosi ideal agar bisa menjual potensi wisata diwilayahnya. Berbagai brosur dan majalah yang menceritakan keindahan dan idealitas obyek wisata Kabupaten telah disebar di berbagai daerah. Manuver promotif yang dilakukannya bisa memperkenalkan Jember dengan lebih menyeluruh terhadap masyarakat luas, sehingga ketika kehadiran wisatawan ke Jember sudah memiliki gambaran terhadap obyek yang akan dikunjunginya.

Perkembangan pariwisata Kabupaten Jember ini berdampak pada perkembangan perekonomian di Kabupaten Jember melalui indikator besaran *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB), di mana pariwisata menjadi kontribusi terbesar kedua dalam membentuk PDRB Kabupaten Jember pada tahun 2009-2010. Pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Jember mengalami kenaikan terus pada kisaran 6,04%. Kenaikan yang signifikan ini dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran (9,48%) diikuti sektor bangunan (8,91%) dan sektor industri pengolahan (8,37%) (Profil Disperindag, 2013; 21). sektor perhotelan tumbuh sebesar 7,24 %. Hal ini akibat pengaruh kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan sebesar 534.955 orang. Beberapa hotel berbintang pun mulai dibuka di Jember, seperti Aston Jember Hotel & Conference Center, Royal Hotel N' Lounge, Istana Hotel dan Restaurant, Hotel Bintang Mulia, Hotel Bandung Permai, Hotel Panorama, dan beberapa hotel lainnya. Kondisi ini menggambarkan terbangunnya kepercayaan dan minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember. Perekonomian Jember diprediksi akan tumbuh lebih pesat dengan beroperasinya Bandara Notohadinegoro.

Apalagi maskapai Garuda sudah melakukan uji coba dan sudah bersiap membuka rute penerbangan Surabaya-Jember sebelum pertengahan 2014. Tahun 2008, PAD Kabupaten Jember dari sektor pariwisata hanya menyumbangkan Rp 2,5 Miliar, namun pada tahun 2014 sumbangan dari sektor pariwisata mampu menembus angka Rp 12 Miliar, dan dari jumlah total ini Rp 1,2 Miliar dihasilkan dari restoran atau wisata kuliner. Faktor yang sangat menunjang bagi PAD adalah karnaval dimana APBD Jember tahun 2014 mencapai Rp 3 triliun (Profil Disperindag, 2013; 7).

Perkembangan industri pariwisata yang terangkat melalui program BBJ dengan menggandeng JFC memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata di daerah pesisir akan mendorong pembangunan-pembangunan sarana perekonomian lainnya seperti akses jalan, pertokoan, fasilitas rekreasi dan hiburan, dan usaha jasa yang dibutuhkan wisatawan seperti jasa transportasi perjalanan, jasa pemandu wisata, dan lain-lain. Dampak perkembangan pariwisata Kabupaten Jember bagi daerah pinggiran yang nyata adalah peluang usaha bagi masyarakat daerah pesisir selain pekerjaan di sektor perikanan.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pariwisata Kabupaten Jember mulai berkembang ketika MZA. Djalal menjabat sebagai bupati selama dua periode yaitu 2005-2010 dan 2010-2015. Ketertarikan pemerintah daerah untuk lebih serius dalam mengelola pariwisata, karena sektor pariwisata memberikan sumbangan besar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini yang mendorong pemerintah Kabupaten Jember lebih serius dalam mengelola pariwisata.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola pariwisata, di antaranya adalah membuat kebijakan yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pariwisata, mendirikan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember beserta formatur organisasi, merenovasi alun-alun sebagai simbol identitas Kota Jember, pelebaran jalan administrasi di Kota Jember dan memperbaiki jalan-jalan yang menuju area wisata di daerah pantai, serta membuka dan mengoperasikan bandara udara Notohadinagara untuk mempermudah akses kedatangan wisatawan ke Jember.

Pembenahan infrastruktur ini diiringi dengan strategi pemerintah daerah dalam memasarkan potensi wisata. Melalui program Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ) pemerintah daerah mempromosikan tempat-tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Jember. Program BBJ mulai digarap dan dilaksanakan pada 2007 yang berisi rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia

menjadi sarana promosi wisata Kabupaten Jember dengan memperkenalkan potensi-potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Jember.

Kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan sebesar 534.955 orang, mempengaruhi pertumbuhan perhotelan di Kabupaten Jember sebesar 7,24 %. Beberapa investor besar yang menanamkan modalnya ke Jember, antara lain PT Sanyo Sales, PT Indosat Tbk, PT Semen Puger Jaya Raya Sentosa, PT G'seeds, PT Indonesia Indah Tobbaco Citra Niaga, PT Carrefour, dan PT Giant Express. Total jumlah investasi yang ditanam sebesar Rp 217,336 miliar, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.523 orang.

Sedangkan untuk daerah pinggiran pembangunan pariwisata di Kabupaten Jember memberikan pengaruh bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar tempat wisata itu berdiri, yaitu peluang usaha di luar sektor pertanian dan perikanan. Peluang usaha dari pembangunan pariwisata di daerah pesisir sangat berpengaruh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dampak adanya pembangunan pariwisata sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk peluang usaha di luar sektor perikanan.

Daftar Pustaka

1. Antlov, Hans, *Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002.
2. Arsyad, Lincolin, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPF, 1990.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember "Direktori Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Jember 2008-2028", Jember: Bappeda, 2008.
4. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jember Tahun 2013*, Jember: BPS, 2013.
5. Bahriadi, Dianto, *Status Perkebunan di Indonesia Kontemporer dalam Reformasi Agraria*, Jakarta: LPFE UI, 1997.
6. Balai Taman Nasional Meru Betiri, *Kawasan Konservasi Meru Betiri*, Jember: Balai Taman Nasional Meru Betiri, 2014.
7. Chalid, Pheni, *Otonomi Daerah; Masalah, Pemberdayaan, Dan Konflik*, Jakarta: Kemitraan, 2005.
8. Gotschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982.
9. Hoogvelt, Anhe MM, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta: CV Rajawali, 2003.
10. Jember Dalam Angka Tahun 2014, Jember: BPS, 2014.

11. Kahin, George McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, terj. Jakarta: kerjasama Pustaka Sinar Harapan dan Sebelas Maret University Press, 1995.
12. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Profil Pariwisata Kabupaten Jember*, Jember: Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2005
13. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Deskripsi dan Inventarisasi Cagar Budaya Kabupaten Jember Tahun 2014*, Jember: Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2014.
14. Kabupaten Jember, *Mapping Pengembangan Obyek Wisata Kawasan Selatan Kabupaten Jember*, Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2014
15. Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993
16. Kartasapoetra, G. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
17. Keban, Y.T., *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.
18. Kodhyat, H. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1996.
19. Linblad, Thomas, *Fondasi Histori Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi-Sosial Asia Tenggara Universitas Gajah Mada dan Pustaka Pelajar, 2002.
20. Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial; Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012
21. Nugroho, Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2006.
22. Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
23. Pemerintah Kabupaten, *Draft Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015*, Jember: Pemerintah Kabupaten, 2010.
24. Pemerintah Kabupaten Jember, *APBD Kabupaten Jember 2006-2010*, (Jember: Pemda, 2010.
25. Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2012*, Jember: Desperindag, 2012
26. Profil Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember, *Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Jember Tahun 2014*, Jember: Disperindag, 2014.
27. Profil Kabupaten Jember 2014, Jember: Sekretariat Humas Kabupaten Jember, 2014.
28. Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
29. Tim Penyusun, *Wakil Rakyat Kabupaten Jember Tempo Doeloe & Sekarang*, Jember: Sekretariat DPRD Jember, 2007.
30. Undang Undang RI No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Bandung: Citra Umbara, 1985.
31. Undang-Undang RI No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
32. Wahab, Salah, *Manajemen Kepariwisataaan*, Terjemahan Frans Gromang, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1976.
33. Widodo, Joko, *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia, 2004.